



TAK KUORUM, RAPUR DPRD BATAL DIGELAR

Pokok Pikiran Dewan Terancam Tak Terakomodir

YOGYA (KR) - Rapat paripurna (rapur) DPRD Kota Yogya yang sedianya digelar Senin (30/3) sore kemarin, akhirnya batal digelar karena peserta sidang tidak mencapai kuorum. Salah satu dampaknya ialah pokok pikiran dewan hasil penjangkaran aspirasi maupun reses, tidak akan terakomodir pada tahun depan.

Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudyatmoko, membenarkan batalnya gelaran rapur tersebut. Sesuai ketentuan, sidang sedikitnya harus dihadiri 21 anggota dewan berdasarkan hasil absensi. Akan tetapi ketika rapur dibuka sampai batas skorsing habis, hanya dihadiri 20 anggota. "Dijadwalkan sore pukul 15.00 WIB, karena belum kuorum kami skorsing hingga pukul 18.00 WIB. Ternyata tetap tidak kuorum, sehingga batal," tandasnya, Selasa (31/3).

Sidang perdana tertinggi di DPRD

Kota Yogya pada masa tanggap darurat Korona ini sedianya membahas dua agenda utama. Yakni penetapan pokok pikiran dewan, dan rekomendasi atas LKPD tahun anggaran 2019. Otomatis karena pokok pikiran dewan batal ditetapkan maka tidak bisa diajukan dalam musrenbang tingkat kota sebagai dasar rencana kerja tahun 2021.

Danang menyebut, tidak kuornya rapur itu bukan lantaran ketakutan penyebaran Korona, melainkan sikap politik sejumlah fraksi. Pasalnya, pada saat bersamaan jus-

tru ada anggota dewan yang melakukan penyemprotan disinfektan dan diunggah di media sosial. Apalagi sidang rapur kemarin juga sudah menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19 sesuai arahan Kemendagri.

Sementara Ketua Fraksi PKS Bambang Anjar Jalumurti, mengungkapkan jajarannya tidak hadir dalam rapur karena mendukung kebijakan pemerintah terkait work from home (WFH). Sejak awal pihaknya mendorong setwan untuk memfasilitasi rapat-rapat dengan teleconference dari rumah. "Aplikasi untuk itu kan cukup banyak. Apalagi kantor DPRD termasuk kategori rawan karena kerap dikunjungi dewan dari luar kota. Lebih-lebih ada karyawan yang statusnya ODP sehingga protokolnya harus diperketat," urainya.

Terkait pokok pikiran dewan, menurut Bambang terdapat lebih dari 2.700 kegiatan. Jika harus dipaksakan masuk dalam APBD 2021 maka momentumnya tidak tepat di tengah pandemi Covid-19. Sehingga hal itu bisa ditunda untuk masa tahun 2022 mendatang.

Senada disampaikan Ketua Fraksi NasDem Sigit Wicaksono. Jajaran anggota fraksinya juga tidak hadir, bukan karena sikap politik. Melainkan lebih pada teknis penyelenggaraan rapat-rapat di dewan yang seharusnya mendukung kebijakan WFH. "Ini lebih pada perbedaan persepsi pada penyelenggaraan sidang saja. Kita semua sama-sama mendukung kebijakan pemerintah. Mari kita desain rapat yang tidak perlu harus berkerumun. Jadi soal teknis saja di tengah masa darurat seperti ini," tandasnya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Ketua DPRD Kota Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat DPRD Kota			

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005